

BMKG MINTA MASYARAKAT

Waspada Potensi Hujan Lebat Periode Mudik

JAKARTA (KR) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat waspada potensi hujan dengan intensitas lebat melampaui 50-100 milimeter di beberapa wilayah pada periode 19-21 April 2023 atau saat puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2023.

"Dari hasil prakiraan yang perlu diwaspadai terutama untuk wilayah Aceh, Palembang, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan juga di Papua," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (4/4).

Dwikorita menyampaikan, masyarakat juga perlu mewaspada hujan dengan intensitas 20-50 mm yang juga dapat berpotensi menimbulkan gangguan bahkan bencana hidrometeorologi. Hujan dengan intensitas sedang itu berpotensi terjadi di Jawa Barat, Ban-

ten, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa, beberapa provinsi di Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Ambon, serta Papua Barat.

Dwikorita juga mengungkapkan, cuaca saat Lebaran atau pada 22-28 April 2023 diprakirakan mengalami hujan sedang di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, di Pulau Seram, Papua Barat, dan Papua. "Pada periode itu, prakiraan hujan dengan intensitas lebat diprakirakan

sama saat puncak mudik," paparnya.

Untuk periode arus balik, kata Dwikorita, yakni mulai 29 April hingga 5 Mei 2023, diprakirakan hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Pulau Seram, serta Papua. "Kami akan terus meng-update prakiraan ini sampai 6 jam sebelum kejadian," katanya.

Pihaknya akan terus mengencangkan sosialisasi tentang peringatan dini dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, baik pusat maupun daerah. "Sosialisasi tentang peringatan dini ini akan terus digencarkan melalui berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Basarnas agar mudik 2023 dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan Insya Allah selamat," katanya. (Ant/San)-d

SANKSI KERAS KETUA KPU RI

Peringatan bagi Penyelenggara Pemilu

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berharap sanksi peringatan keras terakhir yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, menjadi peringatan bagi penyelenggara Pemilu untuk berhati-hati dalam menyiapkan tahapan Pemilu 2024.

"Makanya, harus hati-hati. Apalagi, ini kan sekarang sudah peringatan keras dan terakhir. Jadi, ini peringatan buat semua teman-teman penyelenggara untuk harus lebih fokus pada persiapan penyelenggara Pemilu. Tidak ngurusin yang lain," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).

Doli meminta penyelenggara Pemilu senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas dan amanahnya dengan memetik pelajaran dari sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Penyelenggara Pemilu harus menunjukkan profesionalitas dan integritas dalam berkomitmen, bertindak, serta berprilaku.

"Karena mereka ini bukan seorang pribadi yang ngurusin pribadi apa. Ini mengurus nasib bangsa Indonesia. Ini tergantung mereka apabila ini bagus apa tidak. Jadi, semua sorotan sekarang mereka akan menjadi perhatian," ujarnya.

Ahmad Doli Kurnia mengatakan, penyelenggara Pemilu yang berkualitas mampu menghadirkan Pemilu yang makin baik dan berkualitas pula, yang akan berimplikasi pada perkembangan kemajuan bangsa ke depannya. "Pemilu itu adalah sebagai vehicle atau kendaraan, atau media untuk mengantarkan bangsa ini pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih berkembang," tuturnya.

Doli merespons sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu atas pertemuan dan perjalanan bersama Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni.

Menurut Doli, kasus tersebut tidak

hanya persoalan antara lawan jenis belaka, tetapi menyangkut pula institusi, yakni penyelenggara Pemilu dengan ketua umum suatu partai politik. "Sebetulnya saya melihatnya ini bukan soal wanita saja. Itu kan ketua umum partai, jadi kalau pun dia seorang laki-laki juga tidak pantas berhari-hari jalan-jalan dengan Ketua KPU," ucapnya.

Interaksi berlebihan tersebut, kata Doli, berpotensi mengancam independensi penyelenggara Pemilu dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu itu sendiri. "Itu kan menimbulkan kecurigaan terhadap partai lain. 'Ada apa ketua umum partai politik seperti sangat akrab berdekatan dengan penyelenggara Pemilu?' Ini kan bicara independensi akhirnya," kata Doli.

Senin (3/4), DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait pertemuan dan perjalanan ke DIY bersama Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni beberapa waktu lalu. (Ant)-d

SOAL PENGAJUAN PK KUDETA DEMOKRAT

Menkumham Tegaskan Bersikap Netral

JAKARTA (KR) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan, pihaknya bersikap netral saat menanggapi upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kudeta Partai Demokrat.

"Kalau dia mengajukan ke pengadilan, kan ada upaya hukum. Ada di PTUN, kasasi, PK, kan begitu. Itu aturan hukum, hak, dan saya tidak mau (ikut) campur," ujar Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (4/4). Yasonna meminta seluruh pihak untuk menaati hukum yang berlaku dan berlaku sebagaimana ketentuan hukum.

Meski demikian, Yasonna menyatakan kesiapan Kemenkumham untuk memberikan jawaban dalam menghadapi PK di Mahkamah Agung, mengingat Kemenkumham-lah yang menyatakan Pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang,

Sumatera Utara. "Kami tentu akan menjawab kalau ada (PK). Ini soal normal saja," ucap Yasonna.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kudeta Partai Demokrat. "Moeldoko mengajukan PK pada 3 Maret 2023," katanya di Jakarta, Senin (3/4).

PK yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun di MA untuk menguji putusan kasasi MA dengan Nomor Perkar: 487 K/TUN/2022, yang telah diputus pada 29 September 2022. Di sisi lain, Moeldoko mengaku tidak mengurus pengajuan PK terhadap putusan kasasi yang memenangkan Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Ora ngerti (tidak paham) aku urusannya," kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti Jakarta, Senin (3/4). (Ant/San)-f

TERBUKTI LAKUKAN PENCABULAN

Pengasuh Panti Divonis 17 Tahun Penjara



KR-Istimewa

Sidang putusan dengan terdakwa Muhammad Tulus di PN Wates.

KULONPROGO (KR) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Wates, menjatuhkan vonis 17 tahun penjara dan denda Rp 100 juta kepada terdakwa Muhammad Tulus (46). Oknum ustadz pengasuh Panti Asuhan di Kapanewon Kokap Kulonprogo, terbukti melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap empat anak asuhnya.

Juru Bicara PN Wates Setyorini Wulandari mengatakan, vonis disampaikan Ketua Majelis Hakim Muhammad Syafrudin Prawiranegara didampingi hakim anggota Nur Jenita dan Evi

Insiyati dalam sidang pembacaan putusan di PN Wates, Senin (3/4).

Terdakwa dianggap bersalah sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Muhammad Tulus, didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif," kata Setyorini, Selasa (4/4).

Dua dakwaan ditujukan ke terdakwa, pertama pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU juncto pasal 76

e UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak Juncto pasal 64 ayat 1 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dakwaan kedua pasal 81 ayat 2 dan ayat 3 UU no 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, juncto pasal 76 e UU No 35/2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis hakim menyatakan, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencabulan dan persetubuhan terhadap empat korban anak asuhnya. Putusan hakim, kedua dakwaan itu dinyatakan terbukti.

"Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 17 tahun denda 100 juta subsidi enam bulan dikurangi masa tahanan," tambahnya. (Rul)-f



Redaksi menerima sumbangan naskah dari para pembaca. Naskah dikirim ke e-mail naskahkr@gmail.com. Terima kasih

Puasa dan Peningkatan Kualitas SDM

Dr Akhir Lusono SSn MM

RAMADAN 1444 H telah kita lalui lebih sepuluh hari. Kita sebut juga bulan Ramadan dengan bulan *syahru Quran* atau bulan diturunkannya kitab suci umat Islam di dunia. Ada juga sebutan Ramadan adalah bulan suci. Bulan yang dalam kitab suci Alquran diterangkan, sehingga umat Islam diharapkan beromba-lomba dalam kebaikan di bulan baik ini. Berfastabiqul khoirat menuju bulan Syawal, bulan kemenangan bagi umat Islam setelah menjalani puasa Ramadan.

Imam Bukhari dan Muslim dalam hadisnya menerangkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, yakni, "Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka, dan pintu-pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu". Maka tepatlah kiranya bahwa bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat ibadah wajib, yakni puasa, digunakan sebagai bulan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena dengan ibadah shiyar Ramadan, maka manusia akan berusaha menjadi insan yang mukhlis, insan yang beriman dan bertakwa. Apalagi manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk paling sempurna dari makhluk lainnya. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS At-Tin ayat 4, *Laqod kholaqnal insaana fi ahsani taqwim*, yang artinya "Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dengan berpuasa. Pertama melatih kesabaran, as-Shabr, yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Seseorang yang berpuasa niscaya tidak akan meleput dalam mengekspresikan emosinya. Manajemen pengendalian diri tentu lebih terarah, tidak menggebu bahkan semaksimal mungkin dalam mengendalikan diri. Kedua melatih empati atau *taeatuf*, yakni kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut, sehingga dengan rasa simpati tersebut seseorang tidak akan memaksakan kehendak. Ada kesadaran bahwa setiap makhluk ciptaan Allah SWT memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, se-



hingga tidak membandingkan. Ketiga, melatih tenggang rasa atau *tasamuh*. Sedang dalam bahasa Arab, *tasamuh* lebih dimaknai sebagai toleransi yang diartikan sebagai sikap tenggang rasa, lapang dada, dan bermurah hati. *Tasamuh* adalah saling menghormati dan menghargai antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan yang sangat beragam sangat diperlukan saling hormat-menghormati. Berbangsa dan beregara terlebih seperti negara Indonesia yang terdiri beragam agama, beragam suku dan beragam budaya, maka sikap *tasamuh* sangat penting. Tidak hanya terbatas pada pemahaman kata-kata, tetapi terimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beregara. Keempat, menahan hawa nafsu atau *jihadun nafsi*, yakni perjuangan menahan hawa nafsu. Ulat yang kita ketahui sebagai hewan yang menakutkan, kemudian berpuasa beberapa saat jadilah kepompong. Beberapa waktu kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Hewan yang sangat indah dan tidak menakutkan, baik anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Beterbangan ke sana ke mari dan menghanggapi bunga-bunga yang menawan.

Berpuasa terdapat keutamaan yang disukai oleh Allah SWT, yang akan menjadikan manusia bertakwa. Maka perintah puasa adalah wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Kecuali bagi orang-orang yang memang diperbolehkan untuk tidak menjalankan dengan alasan tertentu. Kewajiban itu termaktub dalam surah Al Baqarah ayat 183 *"Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alalikum-siyamu kama kutiba 'alaladzina ming qablikum la'allakum tattaqun"* yang artinya: iWahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah semestinya. (*)
Dr Akhir Lusono SSn MM, Wakil Sekretaris Lembaga Seni Budaya PP Muhammadiyah dan Anggota Komisi Seni Budaya Islam MUI DIY.

KEMBALI PIMPIN UST, MASA BAKTI 2023-2027

Ki Prof Pardimin Bercita-cita UST Punya Fakultas Kedokteran



YOGYA (KR) - Ki Prof Drs H Pardimin MPd PhD kembali menjabat sebagai Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, masa bakti 2023-2027. Acara pelantikan digelar di Auditorium Rektorat UST, Jalan Batikan Umbulharjo Yogyakarta, Senin (3/4).

Prof Pardimin mengatakan, pasca pandemi, tantangan dirasa masih cukup berat, terutama mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pasalnya, bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seperti UST, pemasukan paling besar berasal dari mahasiswa. "Upaya kedepan adalah menggenjot jumlah mahasiswa baru, termasuk unit usaha juga kita genjot," terang Prof Pardimin kepada wartawan usai acara pelantikan.

Menurut Prof Pardimin, sebuah PTS akan mendapat kepercayaan tinggi dan diminati masyarakat, jika memiliki kualitas unggul, termasuk para lulusannya. Oleh karena itu, dirinya terus mendorong para dosennya untuk melanjutkan studi doktoral (S3), bahkan hingga sampai Guru Besar. Selain itu melakukan pengembangan kurikulum, meleng-



KR-Devid Permana

Ki Prof Drs H Pardimin MPd PhD.

kapi fasilitas dan lainnya. "Kami (UST) sedang menyiapkan Program Doktoran (S3) dan sebentar lagi itu akan terwujud," ujarnya.

Prof Pardimin bercita-cita UST memiliki Fakultas Kedokteran (FK), meskipun syarat-syaratnya tidak mudah. Menurutnya, FK dipilih, agar Tamansiswa juga bisa mengabdikan kepada masyarakat di bidang kesehatan. "Pendidikan kan Tamansiswa sudah, sedangkan kesehatan yang belum dan itu sesuatu yang penting bagi kehidupan," katanya.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Pelantikan Rektor. Setelah itu pengambian sumpah jabatan dilanjutkan pelantikan Rektor, kemudian penandatanga-

nan berita acara pelantikan. Sebagai saksi yaitu Jenderal (Purn) TNI Tyasno Sudarto dan Prof Dr Sutrisna Wibawa. Adapun yang melantik adalah Ketua Badan Pembina Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Ki Prof Sri Edi Swasono.

Hadir dalam acara pelantikan antara lain Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V Yogyakarta Prof drh Aris Junaidi PhD, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Didik Wardaya, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah V DIY Prof Fathul Wahid, sejumlah Rektor Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta serta para mitra.

Ki Prof Sri Edi Swasono



KR-Devid Permana

Pengambilan sumpah jabatan Rektor UST.



KR-Devid Permana

Rektor UST Prof Pardimin (tengah) bersama Prof Sri Edi Swasono, Jenderal (Purn) TNI Tyasno Sudarto dan Prof Dr Sutrisna Wibawa.